

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat ini harus berdasarkan permusyawaratan perwakilan, dengan demikian rakyat tidak secara langsung mengatur negara melainkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum atau yang bisa kita sebut dengan PEMILU. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan

rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu baik untuk memilih presiden dan wakil presiden maupun memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang semuanya dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU RI. No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam hal ini pemilu seharusnya dipahami bukan sebagai ajang untuk mengukuhkan kekuasaan yang sudah ada, melainkan harus dijadikan proses untuk membentuk pemerintahan baru. Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali, ini merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, namun tampaknya problematika demokrasi yang terjadi masih tetap sama yaitu watak elite politik yang tak mengindahkan etika berpolitik sehingga melahirkan suatu sistem politik yang korup dan destruktif.

Diadakannya pemilu dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat agar dapat menjalankan dan mengatur negara yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga, mampu menjalankan fungsi-fungsinya menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Menurut Syamsudin Haris (kompas, 1/5/2003) terdapat empat faktor dimana orang enggan untuk aktif berperan dalam pemilu yakni :

1. Adanya kekecewaan publik terhadap Partai Politik
2. Partai Politik sebagian kaya akibat *money politic*
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawas di daerah minim melibatkan *civil society*
4. Sistem Pemilu yang rumit

Dari keempat faktor yang disebutkan di atas tampaknya salah satu akan menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di masyarakat adalah adanya kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik ditambah lagi minimnya pendidikan politik yang ada di masyarakat. Pada Era Reformasi sekarang ini yang banyak melahirkan sistem multi-partai ini merupakan sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya. Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik,

sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional. Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik.

Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2009 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam perjalanannya, Undang-Undang ini dianggap belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. tetapi Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan

Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat.

Kehadiran banyak partai pada saat ini tidak serta merta dianggap sebagai titik cerah yang signifikan bagi kebanyakan rakyat, apalagi rakyat Indonesia kebanyakan adalah pemilih tradisional. Dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa partai politik yang bermunculan tersebut tidak dapat muncul dengan ideologi yang dapat mencuri perhatian masyarakat. Partai politik baru dan Partai Politik lama yang lemah cenderung dianggap seperti penghias pesta saja. Rakyat tidak melihat nilai jual yang baik dari tiap Partai Politik tersebut. Hal ini menguatkan ketidaktertarikan rakyat terhadap Partai Politik sedangkan hasrat politik yang ada sangat tinggi. Akhirnya Partai Politik menjadi hambatan atas partisipasi politik masyarakat akibatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Politik. Trauma masa lalu akibat kebohongan publik saat kampanye membuat Partai Politik tidak dijadikan pilihan untuk mewadahi hasrat politik tersebut. Maka rakyat berlomba mencari celah berpolitik menuju kekuasaan tanpa Partai Politik, di antaranya adalah calon perseorangan atau independen seperti yang marak menjadi isu politik saat ini. Dan ini membuktikan bahwa hasrat politik menuju kekuasaan masih bisa disalurkan tanpa partai politik, di antaranya adalah mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada setiap pemilu lantas dalam tiap pilkada senantiasa terhembus isu calon kepala daerah perseorangan. Hal ini membuktikan betapa hasrat politik rakyat Indonesia begitu tinggi.

Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat. Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional.

Masyarakat sangat berharap bahwa partai politik tidak hanya bertujuan kekuasaan politik saja tetapi partai politik harus juga melaksanakan fungsinya secara sungguh-sungguh terutama fungsi rekrutmen politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, pendidikan politik dan lain-lain. Apabila partai politik telah melaksanakan fungsinya dengan baik maka masyarakat akan betul-betul memberikan kepercayaan kepada partai politik secara berkesinambungan, karena kepercayaan masyarakat akan menjadi sebuah barang berharga bagi partai politik itu sendiri, terutama demi eksistensi sebuah mesin politik yang selalu memompa majunya sebuah kekuasaan negara.

Tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat berhubungan dengan perilaku politik masyarakat dalam pemilu, apabila masyarakat percaya maka akan meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan perilaku politik yang baik, ini dapat dilakukan oleh insan atau individu guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh Negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik, adapun yang

dimaksud dengan contoh perilaku politik yaitu: melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun apabila masyarakat kurang percaya terhadap parpol maka ini bisa cenderung negatif yaitu dengan adanya golput atau golongan putih.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul : **TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TENTANG PARTAI POLITIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU POLITIK DALAM PEMILU (Studi pada Masyarakat di Kabupaten Bandung)** apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mampu meningkatkan perilaku positif masyarakat dalam pemilu atau bahkan sebaliknya, mengingat kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih terbilang rendah.

B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

1. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan tersebut di atas, maka penulis membatasi pokok rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Seberapa Besar Tingkat Kepercayaan Masyarakat Tentang Partai Politik dan Hubungannya dengan Perilaku Politik Dalam Pemilihan Umum

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terlebih dahulu, setelah mempelajari keadaan yang sebenarnya maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adakah hubungan yang fungsional antara tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik terhadap perilaku politik dalam pemilu?
2. Bagaimana bentuk hubungan antara tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik dengan perilaku politik dalam pemilu?
3. Seberapa besar kadar signifikansi tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik mempengaruhi perilaku politik dalam pemilu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran secara aktual dan faktual mengenai tingkat kepercayaan masyarakat Desa Margahurip tentang partai politik dan hubungannya dengan perilaku politik dalam Pemilu.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang fungsional antara tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik terhadap perilaku politik dalam pemilu.

- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik terhadap perilaku politik dalam pemilu.
- c. Untuk mengetahui signifikansi tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik dan hubungannya dengan perilaku politik dalam pemilu.

D. Kegunaan Penelitian/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti khususnya dan berbagai pihak yang berkepentingan yang secara langsung akan memberikan penguatan teori mengenai sejauhmana tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat dalam pemilu.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk dijadikan studi banding dalam menilai dan menentukan suatu sistem ataupun mekanisme yang paling tepat dalam sistem politik di Indonesia mendatang.

E. Anggapan Dasar

Sebagai titik tolak berfikir dalam masalah penelitian ini penulis menggunakan anggapan dasar sebagai berikut :

1. Pemilu merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam Negara demokrasi. Namun tidak berarti bahwa Negara yang sudah melaksanakan pemilu dapat dikatakan sebagai Negara yang demokratis, karena pemilu yang dilaksanakan secara demokratis belum tentu melahirkan kepala Negara dan wakil Negara yang demokratis. (Dedi Mulyasana, 2003:182)
2. Pengalaman-pengalaman politik berperan penting dalam pembentukan kepribadian politik. (Rafael Raga Maran, 1999:140)
3. Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Partisipasi politikpun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. (Michael Rush dan Philip Althof, 1999:147)
4. Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktifitas-aktifitas politiknya (Rafael Raga Maran, 1999:148)
5. Faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. (Frank Lindenfeld, 1999:156)
6. Cara efisien dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat adalah melalui pendidikan politik, agar melatih rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. (Komala Nurmalina,1985)

7. Golput atau golongan putih dalam pemilu bisa juga muncul karena kerumitan teknis mencoblos nomor dan tanda gambar atau nama caleg. (Tataq Chimad, 2004 : 58)

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian ilmiah, dimana hipotesis ini merupakan suatu petunjuk yang akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data. Sugiyono (2005:82) menyatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan fungsional antara tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik dengan perilaku politik dalam pemilihan umum.
2. Terdapat bentuk hubungan yang linier antara tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik dengan perilaku politik dalam pemilihan umum.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan masyarakat tentang partai politik dengan perilaku politik dalam pemilihan umum.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah persepsi dalam penulisan ini maka penulis mencantumkan penjelasan istilah sebagai berikut

1. Tingkat

Tingkat adalah tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dsb). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:950) dalam hal ini tingkat dapat diartikan sebagai tinggi rendahnya suatu kemajuan yang dalam hal ini berhubungan dengan partisipasi politik.

2. Kepercayaan

Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau nyata. Harapan dan keyakinan akan kejujuran (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama atau sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan yang berbudaya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:564).

4. Partai politik

Partai politik adalah organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. oleh Sigmund Neuman (Miriam Budiardjo, 2000:162)

5. Perilaku politik atau political behavior

Perilaku politik atau *political behavior* adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik atau kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1992:131).

6. Pemilihan umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. (UU No 12 Tahun 2003 Pasal 1).

H. Metode Dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan teknik dan alat tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis, mengacu pada Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2002:33) yang menjelaskan bahwa metode deskriptif yaitu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukannya pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan secara statistik.

2. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian dan pengumpulan data dengan pendekatan survei yang meliputi:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Menurut Ahmad Supardi (1978:14) observasi adalah pengamatan langsung yang sistematis dan objektif terhadap gejala-gejala diluar pengamatan observer. Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi objektif masyarakat di Kabupaten Bandung.

b. Angket

Angket atau kuesioner, adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto: 2002 :128) angket ini disebarkan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

c. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nasution (1996:73), bahwa “tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.

d. Studi Literatur

Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku-buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

I. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek yang dijadikan sebagai titik perhatian dalam suatu penelitian, Suharsimi Arikunto mengatakan (2002:99) bahwa variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian. Biasanya dalam penelitian terdapat variabel penyebab (independen) atau variabel bebas dengan tanda X dan variabel akibat (dependen) atau variabel terikat dengan tanda Y.

Dalam penelitian ini dapat ditentukan variabelnya sebagai berikut:

1. Variabel bebas atau independen variabel (X) dalam penelitian ini yaitu; Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
2. Variabel terikat atau dependen variabel (Y) dalam penelitian ini adalah; perilaku politik dalam pemilihan umum.

Tabel 1.1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Ukuran
Kepercayaan masyarakat (X)	Percaya terhadap pemimpin politik	a. Percaya terhadap pejabat pemerintah yang membuat keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki keyakinan diri terhadap hasil keputusan pimpinan • Memiliki keterbukaan terhadap rekan kerja • Dapat mengambil keputusan dengan tepat • Percaya pada dedikasi dari pejabat pemerintah
		b. Percaya terhadap partai politik	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki keyakinan terhadap visi dan misi partai • Memilih partai tertentu sebagai aspirasi politik • Percaya bahwa partai tertentu dapat melakukan

			perubahan
		c. Percaya terhadap calon legislatif dalam pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki keyakinan terhadap kemampuan dari calon legislatif • Percaya bahwa calon legislative dapat membawa aspirasi masyarakat • Memiliki kepercayaan kejujuran calon legislatif
	Percaya terhadap organisasi politik	a. Menjadi anggota organisasi politik	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk menjadi anggota organisasi politik • Aktif dalam kegiatan organisasi politik • Ikut terlibat dalam kampanye partai politik
		b. Berperan aktif menjadi pengurus partai politik	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

			<p>partai politik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam memajukan partai politiknya • Aktif mengurus partai politik
		<p>c. Berperan dalam pengkaderan partai politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan aktif dalam proses pendidikan politik di masyarakat • Aktif dalam pengembangan dan pelatihan kader partai • Berperan dalam merekrut kader partai
Perilaku politik (Y)	Perilaku politik masyarakat	a. Tingkat Partisipasi politik	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif dalam memberikan suara dalam Pemilu • Ikut serta menjadi panitia pengawas pemilu • Ikut berperan serta dalam memilih Calon Kepala Daerah

		<p>b. Keputusan untuk memilih partai politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih partai politik sesuai dengan aspirasinya • Memiliki pandangan yang sama dengan partai politik • Memiliki kader partai yang diunggulkan
		<p>c. Keterikatan emosional dengan partai politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap ideologi partai • Memiliki ideologi yang sama dengan partai politik tertentu • Adanya kesesuaian antara pemilih dengan perilaku partai tertentu

J. Lokasi, Populasi dan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bandung.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam setiap penelitian ilmiah yang berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan, perlu didukung dengan adanya sejumlah data dari lapangan. Sehubungan dengan proses pengumpulan data tersebut, perlu ditegaskan mengenai populasi dan sampelnya. Sugiono (2008) memberikan penjelasannya mengenai populasi, bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat RW 10 Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang mengikuti pemilihan umum yang berjumlah 464 orang.

b. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2008), “sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Adapun sampel menurut

Suharsimi Arikunto (2007), yakni “sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang di teliti

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang dalam penelitian ini, menggunakan teknik *stratified random sampling*, dimana menurut Sugiono (2008:121) yaitu “teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak *homogeny* dan berstrata secara proposional”.

Dalam teknik *Simple Random Sampling* semua subyek yang termasuk dalam populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan anggota sampel. Masing-masing subyek diberi nomor urut dengan abjad nama atau urutan nomor semula. Dengan kertas gulungan yang berisi nomor-nomor subyek, dilakukan lotre seperti cara lotre yang sudah umum dikenal (Arikunto, 2002:96).

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil maka digunakan rumus Taro Yamane. Dengan ukuran populasi (N) = 464 orang maka jumlah sampel yang akan dijadikan unit analisis dihitung menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+(Nd^2)}$$

dimana : n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = tingkat presisi yang ditetapkan (10%)

Berdasarkan rumus dan asumsi di atas, diperoleh sampel minimal sebagai berikut:

$$n = \frac{464}{1 + (464)(0,1)^2}$$

= 82,3 dibulatkan jadi 82 orang

